

ETIKA PROFESI AKUNTAN DALAM ESG REPORTING & GREENWASHING

Kartika Putri Amelia¹⁾, Riska Pebrioca²⁾, Risniati³⁾, Sifa Aulia⁴⁾, Putri Nabila⁵⁾, Diah Ayu Sekar Astuti⁶⁾

kartikaputriamelia8@gmail.com¹⁾, riskapebrioca@gmail.com²⁾, risniati107@gmail.com³⁾, auliasifa846@gmail.com⁴⁾, putrinabil4444@gmail.com⁵⁾, diahayusekar20.da@gmail.com⁶⁾

^{1),2),3),4),5),6)}Universitas Tangerang Raya

ABSTRAK

Seiring dengan bertambahnya perhatian terhadap Elemen Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG), laporan yang menyoroti keberlanjutan telah menjadi sarana penting untuk mempertanggungjawabkan, yang didukung oleh peraturan seperti POJK No. 51/2017. Akan tetapi, praktik greenwashing penyampaian informasi ESG yang menyesatkan atau tidak benar menyebabkan keraguan tentang laporan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dalam era digital yang penuh kompleksitas dan tuntutan pengakuan, validitas informasi non-finansial sangat bergantung pada peran krusial akuntan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki posisi etis akuntan dalam meningkatkan keterbukaan laporan ESG, menganalisis tantangan regulasi dan praktik yang ada di Indonesia, serta mencari solusi untuk mengurangi aktivitas greenwashing. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan kajian literatur yang sistematis dan analisis konten dari berbagai jurnal lokal serta internasional, laporan keberlanjutan perusahaan di sektor manufaktur dan layanan keuangan, serta norma etika profesi yang disusun oleh AICPA dan IFAC. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap laporan ESG di Indonesia cukup baik, meskipun ada variasi dalam kualitas informasi yang disampaikan. Etika profesi yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme dianggap sebagai dasar yang penting untuk menghindari distorsi informasi dan ketidaksesuaian antara laporan dan kinerja nyata. Selain itu, efektivitas dalam mengurangi greenwashing terbukti meningkat dengan keterlibatan auditor eksternal dalam memastikan mutu ESG, penguatan tata kelola internal, dan pemanfaatan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendeteksi inkonsistensi data. Etika dalam akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai alat utama dalam menjaga keaslian laporan keberlanjutan. Penanaman nilai-nilai baik dalam budaya perusahaan, peningkatan standar audit yang independen, dan penyesuaian terhadap kemajuan teknologi digital adalah langkah penting untuk membangun sistem ESG yang otentik dan transparan di Indonesia.

Kata Kunci: Etika Profesi, Akuntan, ESG, Greenwashing, Pelaporan Keberlanjutan, POJK 51/2017, Transparansi.

ABSTRACT

With the growing focus on Environmental, Social, and Governance (ESG) factors, sustainability reporting has become a vital mechanism for accountability, supported by regulations such as POJK No. 51/2017. However, the practice of "greenwashing"—involving misleading or

inaccurate ESG disclosures—has raised doubts regarding the credibility of these reports and undermined stakeholder trust. In a complex digital era driven by demands for transparency, the validity of non-financial information relies heavily on the crucial role of accountants. This study aims to examine the ethical stance of accountants in enhancing ESG reporting transparency, analyze existing regulatory and practical challenges in Indonesia, and identify solutions to mitigate greenwashing. A qualitative approach was adopted, utilizing a systematic literature review and content analysis of local and international journals, corporate sustainability reports from the manufacturing and financial services sectors, and professional ethical standards established by the AICPA and IFAC. The findings indicate that compliance with ESG reporting requirements in Indonesia is generally satisfactory, although the quality of disclosed information varies. Professional ethics—encompassing principles of integrity, objectivity, and professionalism—are deemed essential for preventing information distortion and discrepancies between reported data and actual performance. Furthermore, the study demonstrates that greenwashing can be effectively reduced through the involvement of external auditors in ensuring ESG data quality, strengthening internal governance, and leveraging Artificial Intelligence (AI) to detect data inconsistencies. Accounting ethics serve not only as a moral guide but also as a primary tool for safeguarding the authenticity of sustainability reports. Instilling positive values within corporate culture, enhancing independent audit standards, and adapting to digital technological advancements are critical steps toward establishing an authentic and transparent ESG system in Indonesia.

Keywords: Professional Ethics, Accountants, ESG, Greenwashing, Sustainability Reporting, POJK 51/2017, Transparency.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan besar dalam cara menilai prestasi perusahaan. Dahulu, keberhasilan sebuah perusahaan lebih banyak diukur dengan indikator keuangan, sekarang fokus para pemangku kepentingan juga mencakup tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Perubahan ini telah melahirkan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai kerangka lengkap untuk menilai kinerja perusahaan secara menyeluruh. ESG bukan hanya sekadar alat untuk mengevaluasi kinerja di luar aspek keuangan, tetapi juga merupakan tolak ukur penting untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan kepercayaan publik (Mutia, 2025; Susanti et al., 2025).

Dalam konteks ini, pelaporan ESG atau laporan keberlanjutan menjadi alat penting untuk menyampaikan informasi mengenai dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan perusahaan. Pelaporan ini tidak hanya untuk memenuhi peraturan yang ada, tetapi juga sebagai cara berkomunikasi yang strategis kepada investor, regulator, dan masyarakat.

Dengan meningkatnya kesadaran dunia tentang isu perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan tata kelola perusahaan, kebutuhan akan informasi yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya semakin meningkat (Setyaningrum & Hasanah, 2025).

Di Indonesia, dedikasi terhadap pelaporan yang berkelanjutan terlihat melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pihak berwenang. Salah satu peraturan penting adalah POJK No. 51 Tahun 2017 yang mengharuskan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan terbuka untuk membuat laporan keberlanjutan. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong penerapan prinsip ESG dalam praktik bisnis di negara ini, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan, khususnya dalam hal kualitas pengungkapan dan mendalamnya isi laporan tersebut (Mutia, 2025). Selain itu, Indonesia juga menunjukkan komitmen terhadap agenda internasional melalui ratifikasi Perjanjian Paris yang diterapkan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016, serta kebijakan pendukung seperti Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon (Aptasari et al., 2024).

Namun, peningkatan jumlah perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan tidak selalu disertai dengan peningkatan dalam kualitas dan keandalan informasi yang diberikan. Salah satu masalah utama yang terjadi adalah praktik greenwashing, yaitu tindakan perusahaan dalam menyampaikan informasi yang menipu atau melebih-lebihkan tentang kinerja keberlanjutan mereka. Tindakan ini menciptakan ketidakcocokan antara apa yang diungkapkan dengan kondisi sebenarnya dari perusahaan dan bisa mengurangi kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan (Setyaningrum & Hasanah, 2025). Selain itu, lemahnya sistem jaminan, ketidakpastian standar pelaporan, serta tujuan untuk membangun citra juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya greenwashing dalam praktik ESG di Indonesia (Susanti et al., 2025).

Fenomena greenwashing menunjukkan adanya masalah ketidakseimbangan informasi dan kesulitan dalam memverifikasi laporan keberlanjutan secara independen. Informasi terkait ESG yang tidak bersifat keuangan umumnya lebih rumit dan sulit untuk diukur jika dibandingkan dengan informasi keuangan, sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan manipulasi atau memilih apa yang ingin mereka ungkapkan. Dalam beberapa situasi, greenwashing bahkan dipakai sebagai strategi untuk menjaga citra positif perusahaan meskipun tidak ada perubahan yang nyata dalam cara mereka beroperasi (Setyaningrum & Hasanah, 2025).

Menghadapi tantangan tersebut, peran akuntan menjadi sangat penting. Akuntan tidak hanya bertugas menyusun dan menyajikan laporan keuangan, tetapi juga semakin berperan dalam pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, penerapan etika dalam profesi akuntan menjadi hal utama untuk menjaga kejujuran dan keandalan informasi yang disajikan. Etika akuntansi berfungsi sebagai pemandu moral yang menyoroti pentingnya integritas, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab profesional dalam setiap tahap pelaporan (Zhang, 2024).

Lebih jauh lagi, berbagai penelitian menunjukkan bahwa etika adalah dasar utama untuk memastikan kualitas, kebenaran, dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG. Komitmen etis perusahaan terbukti efektif dalam mencegah praktik manipulatif seperti greenwashing dan meningkatkan kepercayaan informasi yang diberikan kepada masyarakat (Susanti et al., 2025). Dalam hal ini, prinsip-prinsip etika profesi akuntan seperti integritas, objektivitas, profesionalisme, dan perilaku etis menjadi faktor penting untuk menjaga mutu pelaporan keberlanjutan (Setyaningrum & Hasanah, 2025).

Di samping itu, keberadaan jaminan ESG oleh auditor eksternal juga membantu meningkatkan validitas laporan keberlanjutan. Namun, seberapa efektif jaminan tersebut masih tergantung pada kualitas proses jaminan, standar yang diterapkan, serta independensi penyedia layanan. Keterbatasan dalam praktik jaminan saat ini menjadi salah satu alasan mengapa beberapa laporan ESG di Indonesia masih memiliki kredibilitas yang rendah (Susanti et al., 2025).

Di sisi lain, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai menghadirkan kesempatan baru untuk meningkatkan mutu laporan ESG. Teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk menganalisis data dengan lebih tepat, menemukan ketidaknormalan, serta mengenali potensi greenwashing dengan lebih efisien. Namun, penggunaan teknologi ini harus tetap didasari oleh etika profesional supaya tidak menimbulkan risiko baru di dalam praktik pelaporan (Zhang, 2024).

Seiring dengan meningkatnya kerumitan pelaporan ESG dan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk regulator, investor, dan masyarakat, kebutuhan akan penerapan etika profesi akuntan semakin mendesak. Tanpa dasar etika yang kuat, laporan keberlanjutan berisiko hanya menjadi prosedur administratif yang tidak menggambarkan kenyataan sebenarnya. Oleh karena itu, penguatan etika profesi akuntan menjadi sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis modern.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis praktik greenwashing dalam laporan ESG serta mengevaluasi dampak etika profesi akuntan dalam menghadapi fenomena ini melalui metodologi studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkuat pemahaman tentang pentingnya etika untuk menjaga kredibilitas laporan ESG dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaporan keberlanjutan atau *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah berkembang menjadi instrumen modern yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan kepada para pemangku kepentingan. Pengungkapan ESG yang berkualitas tinggi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi strategis, tetapi juga terbukti mampu meningkatkan reputasi perusahaan, legitimasi sosial, serta kepercayaan investor dan masyarakat luas. Namun, masifnya tuntutan publik dan pasar modal terhadap pemenuhan kriteria keberlanjutan ini justru memicu peningkatan risiko praktik *greenwashing*, yaitu tindakan manipulatif berupa penyampaian klaim lingkungan atau narasi keberlanjutan yang dilebih-lebihkan, ambigu, selektif, atau menyesatkan demi membangun citra positif tanpa adanya bukti operasional yang substantif. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk seperti manipulasi data, manipulasi visual, penghilangan informasi penting, hingga penggunaan narasi yang menipu publik demi mendapatkan dukungan sosial secara instan. Praktik tidak etis tersebut menyebabkan penurunan kredibilitas laporan ESG secara signifikan, memperbesar ketidakpercayaan pemangku kepentingan, serta memicu keraguan di kalangan investor yang semakin mengandalkan data non-keuangan ini untuk pengambilan keputusan ekonomi.

Secara teoritis, motif dan dampak dari pelaporan ESG serta perilaku *greenwashing* dapat dijelaskan melalui beberapa lensa konseptual utama, yaitu teori legitimasi, teori agensi, dan teori pemangku kepentingan. Berdasarkan teori legitimasi (*legitimacy theory*), perusahaan berusaha memperoleh dan mempertahankan pengakuan sosial dengan menunjukkan bahwa aktivitas bisnis mereka selaras dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks negatif, laporan ESG rentan disalahgunakan sebagai alat legitimasi simbolik untuk menciptakan citra ekologis palsu demi mengamankan dukungan publik. Sementara itu, teori agensi (*agency theory*) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara pemilik perusahaan

(*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana manajemen cenderung menguasai informasi internal yang lebih banyak sehingga menciptakan asimetri informasi. Kondisi asimetri ini kerap dimanfaatkan secara oportunistik oleh manajemen untuk melakukan *greenwashing* guna meraup keuntungan reputasi pribadi atau memenuhi target bisnis jangka pendek. Di sisi lain, teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menegaskan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab moral kepada seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya berorientasi pada pemegang saham, sehingga penyajian data ESG yang transparan dan akurat merupakan bentuk pemenuhan ekspektasi sosial yang sejati. Teori-teori ini juga berkaitan erat dengan konsep *decoupling*, sebuah fenomena kesenjangan di mana terdapat perbedaan mencolok antara komitmen atau narasi indah yang tertulis di dalam laporan keberlanjutan dengan praktik operasional riil yang dijalankan oleh perusahaan di lapangan.

Di tengah kompleksitas asimetri informasi dan ancaman *decoupling* tersebut, etika profesi akuntan memegang peran yang sangat vital sebagai fondasi utama untuk menjaga integritas, kejujuran, objektivitas, dan kredibilitas laporan keberlanjutan. Akuntan, baik yang bertindak sebagai penyusun internal maupun pemeriksa eksternal, mengemban tanggung jawab moral yang besar untuk memastikan bahwa data non-keuangan yang disajikan kepada publik bersifat jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pendekatan deontologi, akuntan diarahkan pada kewajiban moral bawaan untuk selalu berkata jujur, sedangkan pendekatan *virtue ethics* menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai etis serta pembentukan karakter moral individu yang kuat di dalam organisasi. Akuntan profesional yang menjunjung tinggi kode etik termasuk prinsip kompetensi dan perilaku profesional akan lebih mampu mempertahankan independensinya, menolak tekanan bisnis, menghindari konflik kepentingan, serta mendeteksi sekaligus mencegah manipulasi informasi seperti *greenwashing* maupun kecurangan laporan keuangan tradisional yang pernah terjadi pada kasus-kasus besar seperti skandal Enron. Internalisasi etika ini terbukti menjadi variabel kunci; perusahaan yang memiliki komitmen etis yang tinggi dan didukung oleh budaya organisasi yang baik cenderung menghasilkan pengungkapan informasi keberlanjutan yang jauh lebih terbuka, berkualitas, dan konsisten.

Di Indonesia, penguatan kapasitas etis akuntan menjadi semakin mendesak seiring dengan berkembangnya kerangka regulasi pelaporan keberlanjutan formal yang dipelopori oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017. Meskipun regulasi ini berhasil

mendorong tingkat kepatuhan administratif yang tinggi di kalangan emiten dan sektor jasa keuangan, kualitas substansi pelaporannya dinilai masih sangat bervariasi, cenderung normatif, serta belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional yang lebih komprehensif seperti *Global Reporting Initiative* (GRI) yang menekankan materialitas dampak, *Sustainability Accounting Standards Board* (SASB), *Task Force on Climate-related Financial Disclosures* (TCFD), maupun *International Sustainability Standards Board* (ISSB). Kekurangan mekanisme pengawasan yang ketat serta tidak adanya kewajiban eksplisit untuk menyertakan indikator kuantitatif sektoral menjadi celah yang membuat pelaporan nasional sering kali dijadikan formalitas belaka. Oleh karena itu, kehadiran *assurance* ESG yang dilakukan oleh auditor eksternal yang independen dan kompeten menjadi instrumen penting untuk memverifikasi klaim keberlanjutan, menekan asimetri informasi, mengevaluasi bukti operasional, serta mengurangi praktik *decoupling*. Kendati demikian, efektivitas *assurance* ini di Indonesia masih menghadapi tantangan kapasitas teknis dan keterbatasan standar; *assurance* yang dilakukan secara dangkal atau hanya memenuhi lingkup terbatas justru berisiko menjadi sekadar stempel legitimasi simbolik baru tanpa benar-benar mereduksi praktik *greenwashing*.

Pada akhirnya, efektivitas penegakan etika profesi dan pencegahan *greenwashing* tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus didukung oleh mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang kuat serta pemanfaatan teknologi modern. Tata kelola yang baik melalui pengawasan aktif dari komite audit, dewan komisaris, media, dan regulator terbukti mampu memperkuat kualitas laporan ESG, menekan perilaku oportunistik, dan mengarahkan perusahaan pada kepatuhan fiskal yang lebih transparan, seperti penghindaran praktik pelarian pajak (*tax avoidance*) dan optimalisasi instrumen pajak karbon sebagai peluang inovasi keberlanjutan yang kompetitif. Selain itu, di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, pengadopsian teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* / AI) dan ekosistem Audit 4.0 menawarkan solusi revolusioner dalam mitigasi *greenwashing*. Melalui teknologi *Machine Learning* dan *Natural Language Processing* (NLP), auditor dapat menganalisis *big data* secara cepat untuk mengenali pola manipulasi teks serta mendeteksi bahasa yang ambigu atau menyesatkan di dalam laporan keberlanjutan. Ditambah lagi, penggunaan sistem *blockchain* mampu menjamin transparansi penuh karena menyediakan sistem pencatatan data lingkungan yang mutakhir dan sangat sulit dimanipulasi. Walaupun integrasi teknologi AI ini memunculkan tantangan baru terkait etika algoritma, risiko bias data, serta keterbatasan infrastruktur digital,

penggabungan antara budaya etika organisasi yang kokoh, kompetensi baru akuntan di bidang ESG, dan pemanfaatan instrumen verifikasi berbasis teknologi menjadi kunci utama demi mewujudkan pelaporan keberlanjutan yang jujur, transparan, dan berdampak nyata bagi masa depan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) yang mensinergikan tinjauan literatur sistematis, evaluasi konten laporan, dan pengujian empiris. Strategi ini dirancang untuk membedah kompleksitas fenomena *greenwashing* melalui kacamata etika profesi akuntan secara komprehensif, dengan mengombinasikan paradigma interpretivisme (untuk memahami makna) dan positivisme (untuk pengujian fakta).

1. Protokol Pencarian dan Seleksi Diskursus Ilmiah

Untuk menjamin kredibilitas data sekunder yang digunakan, penelitian ini menerapkan prosedur *Systematic Literature Review* (SLR) dengan standar tinggi:

- **Kerangka Konseptual:** Penentuan fokus kajian dilakukan melalui instrumen **SPIDER** guna memetakan entitas pelapor ESG, serta kerangka **SPICE** untuk menganalisis efektivitas intervensi etika akuntan dalam menangani manipulasi informasi lingkungan.
- **Prosedur Filtrasi PRISMA 2020:** Proses seleksi dokumen melewati fase identifikasi, penyaringan (*screening*), hingga pengujian kelayakan. Dari sekitar 150 sumber di pangkalan data **Scopus, Google Scholar, dan DOAJ**, penelitian ini mengerucutkan fokus pada isu spesifik seperti peran AI dalam ESG, etika fiskal, dan mitigasi *greenwashing*.
- **Batasan Waktu:** Studi ini mencakup rentang waktu dua dekade, dimulai dari periode 2005-2020 untuk mendalami fondasi teoretis, hingga periode terkini (2021-2025) guna memotret dinamika regulasi terbaru seperti kebijakan pajak karbon dan implementasi POJK No. 51/2017.

2. Diversitas Sumber Data dan Strategi Sampling

Penelitian ini memanfaatkan sumber data yang bersifat multidimensional:

- **Sumber Sekunder:** Meliputi literatur akademik dari berbagai universitas kredibel (UI, UB, Unair, UGM), panduan dari otoritas global (IFAC, GRI, TCFD, SASB), serta regulasi domestik seperti Perpres No. 98/2021.

- **Penentuan Sampel:** Menggunakan teknik **sampling bertujuan** (*purposive sampling*) terhadap laporan keberlanjutan tahun 2023 dari emiten sektor keuangan dan manufaktur di BEI. Kriteria utamanya adalah kepatuhan terhadap standar POJK 51/2017 dan ketersediaan data secara publik (*open access*).

3. Instrumen dan Mekanisme Pengumpulan Data

Penelitian ini mengintegrasikan instrumen kualitatif dan kuantitatif secara proporsional:

- **Analisis Konten:** Evaluasi laporan keberlanjutan difokuskan pada dua aspek krusial: tingkat transparansi pengungkapan serta kedalaman substansi informasi yang mencakup dimensi kuantitatif dan dampak strategis.
- **Survei Praktisi:** Data primer dihimpun dari kuesioner yang melibatkan **300 akuntan**. Pengukuran dilakukan dengan **Skala Likert 5 poin** untuk membedah persepsi profesional terhadap independensi dan tekanan dalam lingkungan organisasi.
- **Analisis Kasus:** Melakukan observasi mendalam terhadap skandal korporasi besar (seperti Enron) dan simulasi skenario etis untuk mengeksplorasi proses pengambilan keputusan akuntan dalam situasi kritis.

4. Kerangka Analisis Data

Data diolah secara sistematis melalui beberapa tahapan analisis:

- **Model Kondensasi Data (Miles & Huberman):** Melakukan reduksi informasi, kategorisasi tematik, hingga inferensi mengenai korelasi antara integritas moral dengan kecenderungan *greenwashing*.
- **Sintesis Tematik:** Mengklasifikasikan temuan ke dalam pilar-pilar utama seperti implikasi operasional, citra merek, dan urgensi asurans ESG oleh pihak eksternal.
- **Pengolahan Statistik:** Menganalisis hasil survei untuk memetakan hierarki faktor etika yang paling berpengaruh serta menilai efektivitas peran regulator.
- **Triangulasi Teoretis:** Memvalidasi seluruh temuan dengan menyandingkannya terhadap **Teori Stakeholder, Teori Agensi, dan Teori Legitimasi** demi memastikan konsistensi secara konseptual.

5. Penjaminan Kualitas dan Validitas

Otentisitas hasil penelitian dipastikan melalui triangulasi sumber, yaitu menyinkronkan data dari jurnal akademik, kebijakan pemerintah, dan Kode Etik Profesi (IAI/IESBA). Selain itu, dilakukan analisis komparasi dengan standar internasional untuk memetakan kesenjangan praktik (*practice gap*) yang terjadi di lingkup industri Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data primer dan sekunder, penelitian ini mengungkapkan bahwa integrasi etika profesi akuntan dalam pelaporan ESG bukan sekadar kepatuhan administratif, melainkan pilar krusial bagi keberlanjutan korporasi. Berikut adalah rincian temuan utama:

1. Manifestasi Etika Profesi sebagai Instrumen Anti-Greenwashing

Penelitian ini membuktikan bahwa prinsip integritas, objektivitas, dan profesionalisme akuntan bertindak sebagai benteng utama dalam menghadapi tekanan manajemen untuk memanipulasi citra perusahaan.

- **Paradigma *Virtue Ethics*:** Ditemukan bahwa pembentukan karakter moral jangka panjang lebih efektif dibandingkan kepatuhan buta pada aturan tertulis. Akuntan yang menginternalisasi etika kebajikan cenderung lebih berani dalam menyajikan data yang akurat meskipun di bawah tekanan konflik kepentingan.
- **Prioritas Perilaku:** Data kuesioner terhadap 300 responden mengonfirmasi bahwa **kepatuhan hukum (23,3%)** dan **pemeliharaan kepercayaan publik (skor 4,5)** adalah motivasi utama akuntan, yang secara langsung menekan potensi praktik *decoupling* atau ketidaksesuaian antara narasi laporan dengan kinerja lapangan.

2. Dinamika Regulasi dan Kualitas Pengungkapan ESG di Indonesia

Meskipun implementasi POJK No. 51/2017 telah mendorong tingkat pelaporan hingga 97% di Bursa Efek Indonesia, terdapat kesenjangan signifikan pada kualitas substansi.

- **Dominasi Pelaporan Simbolik:** Mayoritas emiten sangat detail pada aspek sosial (seperti pemberdayaan UMKM), namun cenderung kabur dan naratif dalam aspek lingkungan, khususnya terkait target emisi karbon dan strategi *Net Zero*.
- **Urgensi Assurance:** Hanya 50% emiten yang melakukan verifikasi independen. Hal ini menciptakan risiko "akuntabilitas palsu". Penelitian menunjukkan bahwa laporan yang

menyertakan *assurance* memiliki kredibilitas lebih tinggi di mata investor dan efektif mengurangi asimetri informasi.

3. Implikasi Kebijakan Fiskal dan Mitigasi Agresivitas Pajak

Penelitian menemukan hubungan timbal balik yang kuat antara kinerja ESG dengan kepatuhan perpajakan perusahaan.

- **Dampak Pajak Karbon:** Berdasarkan **Perpres No. 98/2021**, pajak karbon tidak hanya menjadi beban operasional, tetapi juga memicu inovasi teknologi hijau. Akuntan memiliki tanggung jawab baru dalam mencatat kredit karbon sebagai aset dan emisi berlebih sebagai liabilitas.
- **ESG sebagai Alat Monitoring:** Perusahaan dengan skor ESG tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah untuk melakukan **penghindaran pajak (*tax avoidance*)**, terutama dipicu oleh dimensi sosial (S-score) yang kuat sebagai bentuk tanggung jawab publik.

4. Transformasi Audit 4.0: Peran AI dalam Transparansi

Di era digital, Kecerdasan Buatan (AI) muncul sebagai solusi teknologi untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam mendeteksi manipulasi data.

- **Deteksi Inkonsistensi:** Penggunaan *Natural Language Processing* (NLP) dan *machine learning* mampu membedah klaim keberlanjutan yang bersifat hiperbolis atau tidak konsisten dengan data operasional aktual.
- **Otomasi Validasi:** Implementasi AI secara signifikan mengurangi celah kesalahan manual (*human error*) dan mempersempit ruang gerak perusahaan untuk melakukan strategi *greenwashing* melalui otomatisasi pengumpulan data yang transparan.

5. Hambatan Organisasional dan Dukungan Institusional

Penelitian menggarisbawahi bahwa efektivitas etika akuntan seringkali terhambat oleh struktur internal.

- **Tekanan Bisnis:** Kasus-kasus seperti skandal audit PT Garuda Indonesia Tbk menunjukkan bahwa tekanan laba jangka pendek dapat melemahkan independensi. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi juga cenderung menghambat transparansi ESG demi efisiensi laba.

- **Solusi Institusional:** Keberadaan sistem *whistleblowing* yang solid, dukungan mentor, kebijakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ketat, serta penguatan sanksi administratif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi prasyarat mutlak bagi perilaku etis yang konsisten.
- **Sintesis Akhir:** Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa etika akuntansi merupakan fondasi untuk mentransformasi laporan ESG dari sekadar instrumen pemasaran menjadi instrumen pertanggungjawaban yang sah. Sinergi antara internalisasi nilai moral, adopsi teknologi AI, dan penguatan regulasi asurans menjadi kunci utama untuk mewujudkan praktik bisnis yang benar-benar berkelanjutan di Indonesia.

6. Kelebihan (Urgen & Strategis)

- **Menjawab Tantangan Bisnis Modern:** Topik ini sangat relevan dengan pergeseran paradigma bisnis global yang tidak lagi hanya mengejar keuntungan finansial, melainkan juga harus peduli pada dampak lingkungan dan sosial.
- **Memperkuat Peran Etika di Era Digital:** Membahas topik ini membuktikan bahwa nilai moral tradisional akuntan (seperti integritas dan objektivitas) tetap menjadi benteng utama, bahkan ketika sistem pelaporan bertransformasi menggunakan teknologi mutakhir seperti *Artificial Intelligence* (AI) dan *blockchain*.
- **Menghubungkan Multidisiplin Ilmu:** Topik ini sangat kaya karena mempertemukan berbagai bidang sekaligus, yaitu **akuntansi keuangan/keberlanjutan** (POJK 51/2017) , **hukum dan regulasi** (Perpres Pajak Karbon) , serta **filsafat moral** (*Virtue Ethics & Deontologi*).
- **Membongkar Sisi Gelap Korporasi (*Greenwashing*):** Topik ini memberikan pisau analisis yang tajam untuk membedakan mana perusahaan yang benar-benar melakukan praktik hijau (otentik) dan mana yang hanya menjadikannya sebagai alat pemasaran kosmetik (simbolik).

7. Kekurangan / Tantangan (Rumit & Bias)

- **Standar Pengukuran yang Masih Abu-Abu (Kompleks):** Tidak seperti akuntansi keuangan yang memiliki standar baku (seperti SAK/IFRS), standar ESG masih sangat beragam dan dinamis (ada GRI, SASB, TCFD, ISSB). Hal ini membuat topik ini rumit

karena parameter "benar atau salah" dalam pelaporan non-finansial sering kali bersifat subjektif.

- **Tingginya Asimetri Informasi:** Data lingkungan dan sosial sangat sulit diverifikasi secara kasat mata dibandingkan data transaksi keuangan. Akuntan sering kali kesulitan mengaudit kebenaran volume emisi atau dampak sosial di lapangan, sehingga topik ini rentan terhadap bias interpretasi.
- **Dilema Tekanan Organisasional yang Masif:** Membahas etika akuntan dalam ESG sering kali membentur tembok realitas industri. Akuntan internal kerap menghadapi dilema etis yang berat: mereka dituntut manajemen untuk menampilkan citra hijau demi memikat investor, namun harus menjaga integritas jika kinerja lingkungan perusahaan sebenarnya buruk.
- **Keterbatasan Kompetensi Teknis Akuntan:** Secara tradisional, akuntan dididik untuk menghitung angka dan uang. Topik ini menuntut keahlian baru di luar bidang akuntansi (seperti memahami sains iklim, amdal, dan teknologi AI) , sehingga penerapannya di lapangan sering kali terkendala celah kompetensi (*competence gap*)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis komprehensif mengenai peran etika profesi akuntan dalam pelaporan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dan mitigasi *greenwashing*, maka penelitian ini menarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- Etika Profesi sebagai Pilar Utama Anti-Greenwashing: Etika profesi akuntan yang mencakup prinsip integritas, objektivitas, kompetensi, dan profesionalisme bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benteng moral utama dalam mencegah manipulasi data. Internalisasi etika berbasis *virtue ethics* terbukti lebih efektif membentuk karakter kokoh akuntan untuk menolak tekanan manajemen dan meminimalkan praktik *decoupling* (ketidaksesuaian narasi dengan realitas lapangan).
- Kesenjangan Substansi pada Regulasi di Indonesia: Meskipun POJK No. 51/2017 sukses mendorong kepatuhan formalitas pelaporan ESG hingga mencapai 97% pada emiten di Bursa Efek Indonesia, kualitas isi laporan masih sangat bervariasi dan cenderung bersifat simbolik. Laporan yang disajikan mayoritas masih bersifat naratif normatif, minim

indikator kuantitatif sektoral, serta belum sepenuhnya selaras dengan standar global (GRI, SASB, TCFD, ISSB).

- Urgensi Assurance Independen dan Pengaruh Fiskal: Tingkat keandalan laporan ESG di Indonesia masih tergolong rendah karena baru sebagian emiten yang menggunakan jasa *assurance* dari auditor eksternal. Padahal, verifikasi independen terbukti krusial untuk memotong asimetri informasi dan mendeteksi pencitraan palsu. Di sisi lain, tata kelola ESG yang baik juga berkorelasi positif pada penurunan agresivitas pajak (*tax avoidance*) dan kesiapan perusahaan dalam menyikapi kebijakan pajak karbon.
- Transformasi Teknologi Audit 4.0: Di era digital, penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) seperti *Machine Learning* dan *Natural Language Processing* (NLP) menjadi solusi revolusioner yang mampu mendeteksi inkonsistensi data serta penggunaan bahasa hiperbolis yang menyesatkan di dalam laporan keberlanjutan secara presisi.

Saran

Guna menciptakan ekosistem pelaporan keberlanjutan yang transparan, autentik, dan akuntabel di Indonesia, beberapa rekomendasi strategis diajukan kepada para pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah dan Regulator (Otoritas Jasa Keuangan / OJK)
 - Harmonisasi Standar Internasional: Melakukan revisi dan penguatan terhadap panduan teknis POJK No. 51/2017 agar mengadopsi indikator kuantitatif materialitas yang selaras dengan standar global, khususnya IFRS S1 dan S2 yang dikeluarkan oleh ISSB.
 - Kewajiban Assurance ESG: Menyusun regulasi bertahap yang mewajibkan emiten (terutama sektor berisiko lingkungan tinggi) untuk menyertakan laporan *assurance* independen pihak ketiga demi menjamin keandalan informasi non-keuangan.
 - Ketegasan Sanksi: Meningkatkan efektivitas pengawasan eksternal dengan menerapkan sanksi administratif yang tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan manipulasi data atau *greenwashing* substantif.
2. Bagi Organisasi Profesi Akuntan (IAI / IAPI)
 - Penguatan Kapasitas Profesional ESG: Mengintegrasikan kurikulum pelaporan non-keuangan, audit emisi karbon, dan risiko etika ESG ke dalam program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi para akuntan dan auditor.
 - Standardisasi Audit 4.0: Menyusun panduan etika dan prosedur audit

-
- berbasis teknologi (AI, *big data analytics*, dan *blockchain*) agar akuntan memiliki legalitas serta kompetensi teknis dalam memverifikasi data digital secara valid.
3. Bagi Praktisi Akuntan dan Perusahaan
- Penyediaan Whistleblowing System yang Mandiri: Perusahaan wajib membangun budaya organisasi yang etis dengan menyediakan jalur pengaduan pelanggaran (*whistleblowing*) yang aman guna melindungi independensi akuntan dari tekanan konflik kepentingan manajemen.
 - Integrasi Pelaporan Fiskal dan ESG: Manajemen dan akuntan internal harus mulai mengintegrasikan pencatatan pajak karbon, liabilitas emisi, serta kredit karbon ke dalam laporan keuangan secara akuntabel, sekaligus menekan praktik penghindaran pajak demi menjaga reputasi sosial korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Novi Tri Setyaningrum & Uswatun Hasanah (2025) Peran Etika Profesi Akuntan dalam Mengurangi Risiko Greenwashing pada Laporan Keberlanjutan (ESG Reporting) di Indonesia <https://doi.org/10.59086/jam.v4i2.862>
- Fety Widiarti Aptasari. Dampak Pajak Karbon pada Akuntansi dan Branding Perusahaan: Perspektif Kesepakatan Paris di Indonesia. Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 8(2) hal 1-25. <https://doi.org/10.31092/subs.v8i2>
- Wenxuan Zhang (2024). Ethical Dilemmas in Accounting: A Comprehensive Analysis of Professional Ethics *Ethical Dilemmas in Accounting: A Comprehensive Analysis...* - Google Scholar
- Devina Kansa Mutia (2025). Analisis Kecukupan Pojk 51/2017 Sebagai Kerangka Regulasi Pelaporan Esg Pada Emiten Sektor Keuangan Indonesia *ANALISIS KECUKUPAN POJK 51/2017 SEBAGAI KERANGKA...* - Google Scholar
- Susi Susanti, Difa Ariyanti Putri & Sapira *Peran Etika dalam Transparansi Sustainability Reporting dan ESG Disclosure: Systematic Literature Review | Integrative Perspectives of Social and Science Journal*
- DF Harseno, AS Purba, EC Hutabarat (2025) Peran Assurance ESG oleh Auditor Eksternal dalam Mengurangi Greenwashing: Systematic Literature Review *Peran Assurance ESG oleh Auditor Eksternal dalam...* - Google Scholar

Arip Sopiannudin & Amir Indrabudiman (2025) Korelasi Pelaporan Esg Dan Transparansi Akuntansi Perpajakan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia *10.8734/musytari.v1i2.3 65*

Naufal Adiwidya Ramawi a & Mukhtaruddin b Greenwashing: Strategi Bisnis yang Adaptif atau Praktik yang Merugikan Pemangku Kepentingan?(2026)
<https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp>

Desta Viananda, Sarah & Tries Ellia Sandari. Analisis Perilaku Etis Akuntan Profesional dalam Perspektif Etika Profesi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (2025) :
<https://scriptaintelektual.com/ascendia/index>

Abim Wafirli, Provita Wijayanti & Lisa Kartikasari. Peran Artificial Intelligence terhadap Praktik Greenwashing dalam Sustainability Report: Systematic Literature Review DOI:
<https://doi.org/10.28918/jaais.v6i1.10175>.